

Skema KPBU Tarif untuk Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan



PROFESI

Perlu Pengembangan
PLTA dan PLTS
Terapung Secara *Hybrid*

8

LAPORAN UTAMA

Program TRT Untuk Pekerja
Mandiri yang *Unbankable*
jadi *Bankable*

12

FILM INFRASTRUKTUR

*Killers of the
Flower Moon*

34



SUSUNAN REDAKSI VFM 2023

PELINDUNG

Dr. Ir. Herry Trisaputra Zuna, S.E., M.T.

PENASIHAT

Sudiro Roi Santoso, S.T., M.T.

PENGARAH

Agus Sulaeman, ST, MM

Ir. Arvi Argyantoro, MA

Reni Ahiantini, ST, M.Sc

Meike Kencanawulan Martawidjaja, S.T, MDM

R. Haryo Bekti Martoyoedo, ST, M.Sc

PEMIMPIN REDAKSI

Anggoro Widyastika, SH, MH

REDAKTUR PELAKSANA

Fenty Meilisya Syafril, S.Sos, M.Si

EDITOR

Putrawan, SH

Ruby Esti Aprilia, SH, MH

TIM REDAKSI

Shara Vadya, S.Ikom

Stephanes M. Anugerah R, S.Kom

Sopan Sopian, S.Sn

Ervin Supriyanto, ST

Novi Riandini, S.Kom

Indah Pratiwi, S.Sos., M.Si

Nurul Qolbi, SE., M.Sc

Rika Andriani, SE., MM

Rifki Maudianda, SE., MBA

Rizki Akbar Maulana, S.Kom., ME., MPP

Glenn Edo Prasetyo Roosland, SIA., MM

Eka Parlita Dewi, SE

Reina Rivenska Disa, ST

Sri Rahmi Purnamasari, M.A

Gunawan Satyono

Muhamad Ihsan

Nini Sunny

Kasih Octoriza

REPORTER

Komarudin

Dwi Cristanto

DESAINER

Fahmi Nurhuda, S.Ds.

Michael Adha

SEKRETARIAT & SIRKULASI

Yudhistira Adi Nugroho, SH., MH.

Dony Triastomo, SE, MM

ALAMAT REDAKSI

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jalan Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan, 12110

Telepon/Fax: (021) 7200793

Email: redaksivfm@pu.go.id

DITERBITKAN OLEH

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Komitmen Pemerintah Mewujudkan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Pemerintah telah berkomitmen untuk menciptakan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk mengimplementasikannya, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Terkait dengan Kemandirian Energi ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) berperan dalam pencapaian Target Energi Baru Terbarukan (EBT).

Sebelum pembahasan lebih jauh, pendefinisian EBT perlu dilihat dari sumbernya. EBT bersumber dari Energi Baru dan Energi Terbarukan. Sumber Energi Baru merupakan sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (*coal bed methane*), batubara tercairkan (*liquified coal*), dan batubara tergaskan (*gasified coal*). Sedangkan Sumber Energi Terbarukan adalah Sumber Energi yang dihasilkan dari Sumber Daya Energi yang berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan, dan perbedaan suhu lapisan laut. Definisi tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa sumber energi terbarukan jenisnya beragam.

Dalam rangka merintis pencapaian target EBT, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), Kementerian PUPR melakukan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Terdapat dua Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang saat

ini menjadi prioritas DJPI yaitu Proyek KPBU Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Kapasitas 6,3 MW, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana progres saat ini adalah proses *Bid Award*, sementara Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan saat ini sedang dalam proses pelelangan.

Kementerian PUPR memiliki potensi yang tinggi dalam mendukung pencapaian target EBT. Terdapat 259 bendungan milik Kementerian PUPR yang berpotensi dimanfaatkan sebagai PLTS Terapung dengan total daya sebesar 14.701,71 MW. Sebagai Informasi tambahan, berdasarkan laporan dari Kementerian ESDM Tahun 2022, disebutkan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2018-2022), terdapat penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga EBT sebesar 2.734 MW. Sumber Energi EBT tersebut berasal dari Bayu, Surya, Bioenergi, Panas Bumi dan Air.

Pada Edisi VFM kali ini, secara khusus kami melakukan wawancara secara tertulis kepada Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA), DJPI untuk menggali lebih dalam dari sisi *financing*nya, yaitu Skema KPBU Tarif untuk Pemanfaatan Bendungan Milik Kementerian PUPR dalam Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Selain itu pembaca juga dapat mengetahui informasi terkait dengan produk dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yaitu Tabungan Rumah Tapera (TRT) melalui Rubrik Laporan Utama. Akhirnya, redaksi mengucapkan selamat membaca.▼

Skema KPBU Tarif untuk Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Untuk menciptakan ekosistem pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan dan menarik bagi investor, diperlukan terobosan dan langkah strategis. Vfm edisi ini berisi artikel tentang Skema KPBU Tarif Untuk Pengembangan Infrastruktur Kelistrikan.

Untuk memperlihatkan dan menguatkan berita yang kami pilih di atas, kami memilih ilustrasi berupa gedung, jembatan, *draft* gambar rancangan, uang koin, dan kalkulator cukup mewakili sebagian besar isi majalah Vfm kali ini yang mengangkat tema skema KPBU pembiayaan infrastruktur. Pemilihan nuansa warna emas, coklat, putih dan abu memiliki arti kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, dan juga kemegahan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.



SAMPUL

Ilustrasi dibuat oleh *artificial intelligence* (AI) melalui *platform* freepik dengan konsep pembiayaan infrastruktur.

Ringkasan Simpul

Market Sounding Flyover Sitinjau Lauik

Menjaring Masukan, Tanggapan dan Minat Calon Investor

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Direktorat PPIJJ), Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melaksanakan *Market Sounding* Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) *Flyover* Sitinjau Lauik, di Jakarta (23/11/23).

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Reni Ahiantini dalam arahannya menyampaikan, bahwa kegiatan *Market Sounding* ini merupakan forum bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi secara menyeluruh terkait proyek KPBU.

"Selain itu juga untuk menjaring masukan, tanggapan dan minat dari calon investor atas KPBU yang ditawarkan oleh Kementerian PUPR selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama atau *Government*

Contracting Agency", ujar Reni Ahiantini.

Jalan Sitinjau Lauik adalah bagian dari jalur yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Solok. Namun kondisi geometrik jalan saat ini tidak memenuhi standar keamanan dan kenyamanan lalu lintas. Tikungan di Sitinjau Lauik memiliki kombinasi geometrik horizontal dan vertikal yang tidak ideal, dengan radius lengkung horizontal kecil dan gradien vertikal besar.

"Hal ini yang menjadi faktor perlunya pembangunan *Flyover* Sitinjau Lauik", ujar Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi, Direktorat PPIJJ, Fina Sjafinas.

Proyek KPBU *Flyover* Sitinjau Lauik mempunyai nilai investasi sebesar Rp2,824 Triliun dengan panjang 2,781 Km dan masa konsesi selama 12,5 tahun.

Skema pengembalian investasi yang digunakan pada proyek ini yaitu berupa pembayaran *Availability Payment* (AP) dari pemerintah kepada Badan

Usaha dan direncanakan akan memasuki tahap lelang pada kuartal I tahun 2024. Adapun tindak lanjut dari *Market Sounding* ini adalah menyampaikan *feedback questioner* dan *Letter of Intent* (LoI) melalui surel paling lambat sampai dengan 1 Desember 2023 Pukul 16.30 WIB.

Selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2023 dilaksanakan *Market Consultation Lender* dan pada tanggal 6 Desember 2023 dilaksanakan *Market Consultation* Badan Usaha (bagi investor yang mengajukan LoI).

Rencana Pembangunan *Flyover* Sitinjau Lauik mendukung sasaran Pembangunan Infrastruktur Ekonomi 2024 yakni memenuhi 3.000 km jalan nasional baru di tahun 2024.

Rencana Pembangunan ini sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP 13/2017) yaitu sebagai bentuk pengembangan jalan arteri primer (berada pada Jalan Lubuk Selasih-Batas Kota Padang).

Detail lebih lengkap terkait Simpul KPBU bisa diakses melalui situs:

simpulkpbu.pu.go.id

8

PROFESI

**Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Sumber Daya Air:
Perlu Pengembangan PLTA dan PLTS
Terapung Secara *Hybrid***



12

LAPORAN UTAMA

Program TRT (Tabungan Rumah Tapera)



18

CERITA LOKASI

**Tiga Dihaji
Bendungan Pertama di Sumatera Selatan**



22

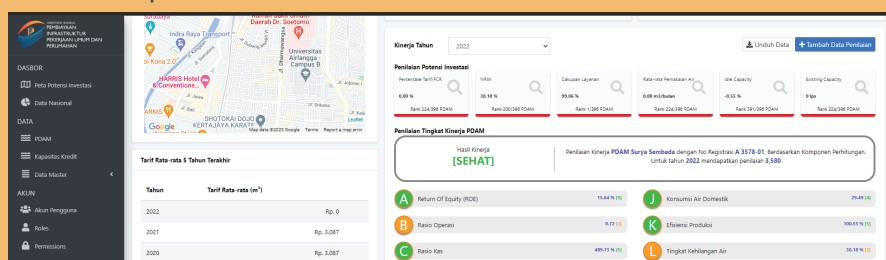
ISU

Indonesian Way of Just Energy Transition



26

GORESAN INFRASTRUKTUR Rancangan Perubahan Peraturan Menteri PUPR



30

OPINI Navigasi Investasi Cerdas untuk Air Minum Aman dan Berkelanjutan



34

FILM INFRASTRUKTUR *Killers of the Flower Moon*

38

LENSA Bendungan

46

SALING BICARA Apa Itu BBA (Bantuan Biaya Administrasi) Pada KPR Bersubsidi?

Perlu Pengembangan PLTA dan PLTS Terapung Secara *Hybrid*

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan (DJPI) mendorong pemanfaatan waduk atau bendungan multiguna untuk mencapai target bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025, dengan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Peran Kementerian PUPR dalam mendukung pencapaian target EBT adalah dengan mensinergikan program pengembangan infrastruktur PUPR khususnya sektor Sumber Daya Air (SDA) yang bersumber dari EBT melalui infrastruktur Ketenagalistrikan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung.

Bisa diceritakan terkait program pemanfaatan Bendungan Milik Kementerian PUPR untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan? Ada berapa bendungan yang berpotensi atau layak dimanfaatkan? Lokasinya di mana saja?

Kementerian PUPR berkomitmen dalam membangun bendungan multiguna untuk irigasi, air baku, pengendali banjir, dan listrik.

Saat ini, Kementerian PUPR memiliki 259 Bendungan yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri atas 187 Bendungan Eksisting, Program Pembangunan 61 Bendungan Tahun 2015-2024, dan 11 Bendungan Baru Tahun 2021-2027 dengan rincian sebagai berikut :

- 187 Bendungan eksisting terdapat 22 bendungan yang memiliki potensi listrik sebesar 545,65 MW;
- Program Pembangunan 61 Bendungan Tahun 2015- 2024 terdapat 43 bendungan yang memiliki potensi listrik sebesar 258,16 MW; dan
- 11 Bendungan Baru Tahun 2021-2027 terdapat 8 bendungan yang memiliki potensi listrik sebesar 123,45 MW.

Penentuan kelayakan proyek KPBU penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan harus berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Pemerintah ataupun Badan Usaha calon pemrakarsa, mengingat pada setiap lokasi bendungan memiliki karakteristik masing-masing.

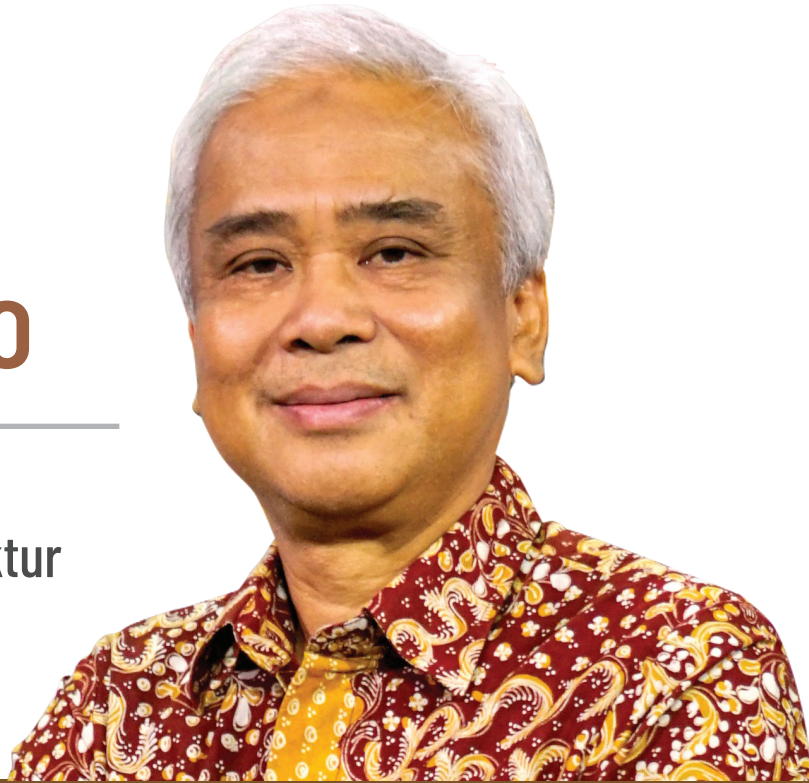
Rencananya pemerintah akan memakai skema KPBU Tarif untuk pemanfaatan bendungan milik Kementerian PUPR dalam rangka pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, bisa jelaskan mekanisme KPBU Tarif ini?

Pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana (BUP) KPBU atas penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang memanfaatkan bendungan milik Kementerian PUPR bersumber dari pembayaran oleh pengguna (*off-taker*) dalam bentuk tarif.

Dalam hal *off-takernya* adalah PT PLN (Persero), batas atas tarif atau harga patokan tertinggi diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Arvi Argyantoro

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air



BUP akan menjual listrik yang dihasilkan kepada *off-taker* baik PT PLN (Persero) ataupun Wilayah Usaha sesuai dengan tarif yang disepakati dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL).

Adapun masa layanan PJBL PT PLN (Persero) selama 25 tahun dengan skema *Take or Pay* yang artinya bahwa PT PLN (Persero) harus menyerap listrik yang diproduksi oleh BUP sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam PJBL.

Siapa saja yang terlibat baik dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan maupun dalam skema tarif nanti?

1. Kementerian PUPR selaku PJPK;
2. Kementerian LHK selaku instansi yang menerbitkan perizinan lingkungan;
3. Kementerian ESDM selaku instansi yang memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) dalam proses penunjukan langsung proyek KPBU;
4. Kementerian PPN/Bappenas selaku instansi yang memantau tahapan pelaksanaan proyek KPBU;

5. Pemerintah Daerah selaku instansi yang mendukung PJPK dan BUP untuk memperoleh izin dan/atau dokumen yang diperlukan;
6. PT. PLN (Persero) atau Wilayah Usaha selaku *off-taker* atau pembeli listrik;
7. Badan Usaha selaku calon investor;
8. BUP selaku badan usaha yang akan melaksanakan proyek KPBU dan penjual listrik; dan
9. Bank atau *Lender* selaku pemberi pinjaman.

Apa saja tantangan yang dihadapi baik dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan maupun pelaksanaan skema tarif nanti? Dan bagaimana solusinya?

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan adalah :

1. Lamanya proses pengadaan BUP

Pada prakteknya, jangka waktu pelaksanaan pengadaan BUP proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan

di Kementerian PUPR membutuhkan waktu sampai dengan 12 bulan.

Sementara itu, proses penunjukan langsung di PT PLN (Persero) membutuhkan waktu selama 6 (enam) bulan, sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 18 bulan.

2. Ketidakpastian tarif pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero)

Pada proses penunjukan langsung di PT PLN (Persero) terdapat negosiasi tarif antara badan usaha dengan PT PLN (Persero), dimana PT PLN (Persero) cenderung untuk menyamakan tarif sesuai dengan harga yang pernah disepakati di wilayah pengembangan PLTA/PLTM/PLTMH tersebut (cukup jauh di bawah harga patokan tertinggi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik).

Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat keuntungan (*Project IRR* maupun *Equity IRR*).

3. Tidak semua Bendungan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan PLTA

Kementerian PUPR memiliki 259 Bendungan yang terdiri atas 187 Bendungan Eksisting, Program Pembangunan 61 Bendungan Tahun 2015-2024, dan 11 Bendungan Baru Tahun 2021-2027 hanya terdapat 73 bendungan yang memiliki potensi Pengembangan PLTA.

Solusi dalam menghadapi tantangan tersebut adalah :

1. Penyederhanaan proses pengadaan BUP

Keterlibatan PT PLN (Persero) sejak awal proses pengadaan di Kementerian PUPR, sehingga proses pengadaan BUP dapat dilakukan hanya dengan 1 (satu) tahap.

Selain itu, berdasarkan konsep **3 bold action**, proses pengadaan KPBU akan diselenggarakan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.



Untuk diketahui, **3 bold action** adalah tiga tindakan utama sebagai bentuk inovasi dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan KPBU di Kementerian PUPR yaitu melalui *Fast Track* KPBU, peningkatan kepastian dalam investasi (*investment certainty*) dan integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) pada proyek KPBU.

2. Revisi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022

Perlu dilakukan revisi Perpres No. 112 Tahun 2022 untuk memberikan kepastian pengembalian investasi badan usaha melalui mekanisme *Feed in Tariff*. Harga *Feed in Tariff* merupakan harga pembelian tenaga listrik berdasarkan persetujuan harga dari Menteri ESDM yang dilakukan tanpa negosiasi dan tanpa eskalasi selama jangka waktu kontrak.



Foto:
Dok. DJPI

3. Pengembangan PLTA dan PLTS Terapung secara *hybrid*

Dengan telah terbitnya Permen PUPR No. 7 Tahun 2023 yang memperbolehkan pemanfaatan lebih dari 20% luasan waduk dan besarnya potensi pengembangan PLTS Terapung pada 256 bendungan milik Kementerian PUPR sebesar 14,7GWh, maka dapat dimaksimalkan pemanfaatannya secara *hybrid* antara PLTA/PLTM/PLTMH dengan PLTS Terapung.

Apa target atau tujuan yang ingin dicapai dari sisi skema pembiayaan KPBU tarif maupun dari sisi pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan?

Target yang ingin dicapai adalah :

1. Proyek KPBU penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan mampu membiayai investasinya sendiri melalui penjualan listrik yang dihasilkan kepada *off taker* baik PT PLN (Persero) ataupun Wilayah Usaha;
2. Adanya kontribusi dari BUP KPBU untuk Operasi dan Pemeliharaan Bendungan yang dimanfaatkan dalam penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan;
3. Penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang memanfaatkan Bendungan milik Kementerian PUPR dapat berkontribusi dalam mendukung pencapaian target bauran EBT; dan
4. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR berkomitmen dalam mencapai *net zero emission* dan *green energy*. ▼

Program TRT Untuk Pekerja Mandiri yang *Unbankable* jadi *Bankable*

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk untuk meluncurkan Tabungan Rumah Tapera (TRT), yang ditujukan untuk pekerja mandiri atau informal.







Para pekerja mandiri seperti ojek online, supir taxi, profesi di bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), atau pekerja kontrak, akan bisa mendapatkan kesempatan mengikuti program Tabungan Rumah Tapera untuk pembiayaan Rumah Pertama atau yang disebut Rumah Tapera.

Berikut wawancara tertulis Majalah VfM -Kementerian PUPR dengan Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera BP Tapera Periode 2019-2024, Eko Arianto, S.E, M.A, terkait dengan kebijakan baru yang tentu saja bakal mengembirakan puluhan jutaan pekerja mandiri:

Pada tanggal 1 Agustus 2023, BP Tapera bersama BTN telah meluncurkan Tabungan Rumah Tapera (TRT), bisa dijelaskan secara detail terkait program TRT ini?

Program Tabungan Rumah Tapera dibuat untuk masyarakat Pekerja Mandiri yang sebelumnya *unbankable* menjadi *bankable*.

Sekaligus menanamkan budaya untuk menabung dengan produk Tabungan Rumah Tapera, tabungan bisa mulai dari Rp.60.000 sampai dengan Rp.240.000 yang dapat di ambil/ dikembalikan (*pada saat cicilan rumah sudah lunas*). Sementara itu sumber KPR berasal dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan bunga *flat* 5% sampai dengan 20 Tahun.



Foto:
Freepik.com

Apa alasan yang melatarbelakangi terpilihnya BTN untuk kerja sama dalam program TRT ini, kenapa tidak dengan bank lain?

BTN merupakan perbankan yang *core business*-nya membiayai Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan sampai saat ini, BTN menjadi satu-satunya perbankan yang pencapaian komitmen KPR Subsidiya paling tinggi. Dengan pengalaman tersebut, maka BTN dipilih sebagai Bank Penyalur karena sudah memiliki sistem yang *settle*.

Sampai saat ini sudah berapa banyak nasabah yang ikut dalam program TRT?

BP Tapera sudah melakukan kerja sama dengan beberapa *aggregator* dan sudah ditindaklanjuti. Program TRT merupakan program penyaluran

KPR Sejahtera berbasis Tabungan dengan skema kerja sama pada komunitas, perkumpulan atau badan hukum lainnya, yang selanjutnya dapat BP Tapera anggap sebagai *aggregator*.

Proses penyaluran KPR Sejahtera diawali dengan kerja sama antara BP Tapera, *aggregator* dan Bank Penyalur (Tripartit). Untuk saat ini, kami sudah bekerja sama dengan beberapa *aggregator* di antaranya (Asgar, KNTI, dan beberapa UMKM lainnya), yang selanjutnya akan ada penambahan kerja sama *aggregator* lainnya.

Untuk nasabah yang akan menjadi peserta TRT, saat ini kami sedang melakukan *follow up* dari masing-masing *aggregator*, dimana kami mengharapkan dalam waktu dekat beberapa anggota dari masing-masing *aggregator* akan segera menjadi Peserta TRT.

“

Program TRT merupakan program penyaluran KPR Sejahtera berbasis Tabungan dengan skema kerja sama pada komunitas, perkumpulan atau badan hukum lainnya, yang selanjutnya dapat BP Tapera anggap sebagai *aggregator*.

”

- EKO ARIANTORO, S.E, M.A -
Deputi Komisioner Bidang
Pengerahan Dana Tapera BP Tapera
Periode 2019-2024

Apa kendala dalam melaksanakan program TRT?

Program Tabungan Rumah Tapera belum banyak diketahui oleh masyarakat dan masyarakat masih belum memahami manfaat yang didapat dari program Tabungan Rumah Tapera

Apa perbedaan antara program TRT dengan produk lainnya yang dikeluarkan oleh BP Tapera?

Produk ini merupakan produk *bundling* antara Tabungan dan Cicilan yang merupakan jawaban bagi pekerja mandiri untuk mempermudah mendapatkan pembiayaan perumahan. Pengembalian pada program tapera hanya dapat dilakukan pada saat peserta memasuki usia pensiun sedangkan pengembalian tabungan pada program TRT dapat diklaim pada saat kredit lunas.

Apa harapan ke depan dengan adanya program TRT ini?

- Program TRT ini adalah sebagai jawaban dimana saat ini masih banyak pekerja mandiri yang masih belum dapat memanfaatkan fasilitas bank atau fasilitas KPR karena statusnya sebagai pekerja yang memiliki penghasilan tidak tetap.
- Dengan adanya produk ini diharapkan pekerja mandiri tersebut memiliki tabungan untuk rencana hari tua, dan sekaligus mendapat kepercayaan dari bank untuk mendapatkan pembiayaan KPR.
- Mengurangi *backlog*.
- Membantu masyarakat yang sebelumnya *unbankable* menjadi *bankable*.
- Membantu masyarakat kalangan pekerja mandiri yang memiliki kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan rumah. ▼

EKO ARIANTORO, S.E, M.A

Deputi Komisioner Bidang
Pengerahan Dana Tapera BP Tapera
Periode 2019-2024



Tiga Dihaji Bendungan Pertama di Sumsel

Dalam rangka mendukung program ketahanan air dan pangan secara nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan sejumlah bendungan pada 2020 hingga 2024.

Pembangunan bendungan ini untuk memenuhi target Visium Tahun 2030 yakni rasio tampungan air terhadap jumlah penduduk bisa mencapai sebesar 120 meter kubik per kapita per tahun. Artinya, meningkat dari kondisi saat ini yang baru mencapai 50 meter kubik per kapita per tahun.

Salah satu bendungan yang tengah dilanjutkan pekerjaannya adalah Bendungan Tiga Dihaji di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Ini merupakan bendungan pertama di provinsi tersebut, yang dirancang akan menambah kapasitas Daerah Irigasi (D.I) Komering untuk lahan pertanian seluas 25.423 hektare (Ha). Dengan begitu, hasil pertanian dari Provinsi Sumsel akan terus terjaga sepanjang tahun, karena mendapat aliran air yang baik dari bendungan ini.

Ada beberapa tujuan utama pembangunan Bendungan Tiga Dihaji, salah satunya adalah untuk menjaga kestabilan suplai air D.I Komering di saat musim kemarau yang selama

ini hanya mengandalkan Sungai Komering.

“Tantangan yang dihadapi dalam pengaturan irigasi adalah pada musim kemarau debit air sungai komering yang masuk ke saluran irigasi sangat kecil. Sementara pada musim hujan elevasi sungai komering naik mengakibatkan debit air sungai Komering yang masuk ke saluran relatif cukup besar dan membawa cukup banyak kandungan lumpur yang mengendap di saluran,” ujar Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII Ditjen SDA Kementerian PUPR Birendrajana yang termuat dalam situs KemenPUPR <https://pu.go.id/>.

Menurut Birendrajana D.I Komering memiliki potensi mengairi lahan seluas 124.000 Ha, dan hingga saat ini baru dapat mengairi lahan irigasi sekitar 70 ribu Ha.

“Sementara sisanya sekitar 50 ribu Ha belum dioptimalkan, yang nantinya akan bertambah sekitar 25 ribu Ha dari Bendungan Tiga Dihaji dan akan dilengkapi dengan pembangunan Bendungan Saka di Kabupaten Oku Selatan yang rencananya juga akan dimulai dan dalam tahap sertifikasi desain,” ungkap Birendrajana.

Selain untuk irigasi, Bendungan Tiga Dihaji juga diperuntukkan untuk konservasi Sumber Daya Air, pengendalian banjir,

pemenuhan kebutuhan air baku sebesar 1 m³/detik, pembangkit listrik sebesar 4x10 MW, dan sarana pariwisata serta olahraga.

Pekerjaan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 4 paket yakni Paket 1 senilai Rp 1,07 triliun dengan kontraktor PT Hutama



Karya (Persero) dan PT Basuki Rahmanta Putra.

Paket 2 senilai Rp 1,34 triliun, dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero), PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk, dan PT SAC Nusantara. Paket 3 dengan nilai kontrak Rp 629,94 miliar, oleh PT Nindya Karya dan PT Taruna



Putra Pertiwi. Paket 4 dengan nilai Rp 690,71 miliar oleh PT Wijaya Karya dan PT Rudy Jaya.

Supervisi pembangunan Bendungan Tiga Dihaji akan dilakukan oleh PT Virama Karya (Persero) Cabang Sumatera Barat dengan KSO PT Tata Guna Patria, PT Tritunggal Pratyaksa, PT Bina Karya

(Persero), dan PT Kwarsa Hexagon dengan nilai kontrak Rp 82,87 miliar.

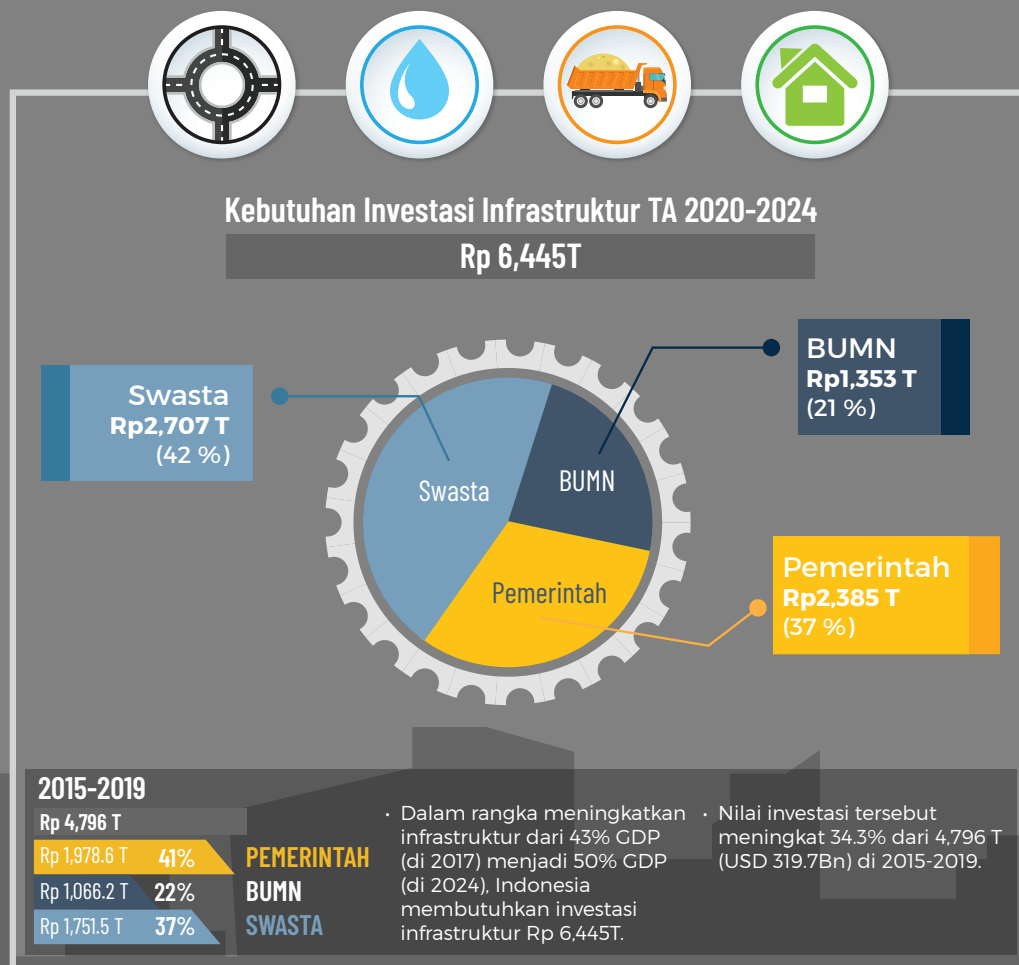
Pembangunan bendungan yang dimulai pada 2018 itu terus dikebut. Pengerjaannya sempat terkendala karena terimbas *refocusing* untuk penanganan Covid-19. Namun target konstruksi tetap diupayakan selesai pada tahun 2024. ▼

Foto Oleh:
Dok. DJPI

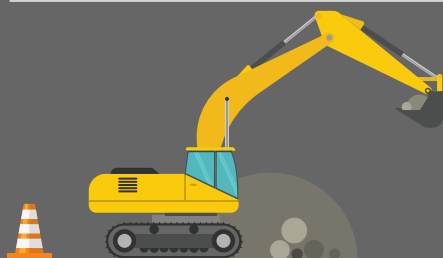
Skema

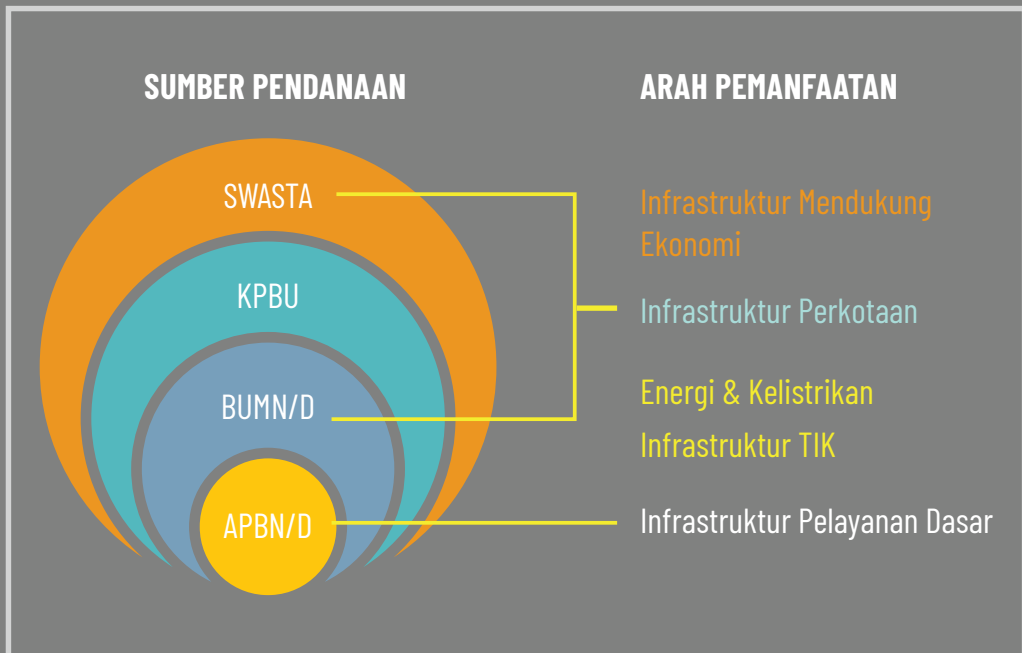
KPBU

Pembiayaan untuk proyek infrastruktur dapat dilakukan dengan menggunakan APBN (rupiah murni) maupun melalui *creative financing*. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan skema KPBU yang merupakan salah satu alternatif pembiayaan dalam rangka mengatasi kurangnya anggaran APBN sebagaimana tercantum dalam gambar:



Sumber: Bappenas





Sumber: Bappenas



Indonesian Way of Just Energy Transition



Pemerintah sangat berkomitmen terhadap pelaksanaan Transisi Energi karena energi merupakan hal yang penting dan strategis untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pemerintah juga menyadari adanya peningkatan kebutuhan energi yang diakibatkan dari pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan energi yang baik dan juga harus diperhatikan terkait pasokan energinya. Sumber energi primer yang dihasilkan dari dalam negeri difokuskan untuk diekspor dalam rangka meraih devisa negara. Sehingga kebutuhan energi di dalam negeri belum optimal. Selain itu, terdapat beberapa

masalah di sektor energi antara lain:

- Penggunaan energi belum efisien;
- Subsidi energi yang belum tepat sasaran;
- Harga energi belum mencapai harga keekonomian;
- Minat investasi yang masih rendah;
- Ketergantungan terhadap Energi fosil yang masih tinggi;
- Keterbatasan infrastruktur Energi;
- Pengembangan infrastruktur Energi belum didukung oleh industri nasional yang kuat dan mandiri;
- Keterbatasan anggaran;
- Lemahnya keberpihakan terhadap produk teknologi dalam negeri;
- Pengembangan riset Energi belum terintegrasi dengan baik;
- Penguasaan teknologi Energi yang masih rendah;
- Pengelolaan Energi belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan;
- Nilai tambah Pengelolaan Energi belum optimal.

Adanya permasalahan tersebut dan juga kaitannya dengan perubahan iklim, maka pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan transisi energi. Pada bulan Desember tahun ini, Presiden Jokowi menghadiri acara KTT *Asia Zero Emission Community* (AZEC) di Jepang dan pada kesempatan tersebut Jokowi menyampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan panduan untuk menghadapi perubahan iklim melalui jalur transisi energi.





KTT AZEC
Foto: setneg.go.id



KTT AZEC
Foto: setkab.go.id

Indonesia, berdasarkan keterangan Jokowi, memiliki *Indonesian Way of Just Energy Transition* melalui pengembangan Energi Terbarukan (EBT) dan penguatan upaya dekarbonisasi. Isu tentang Transisi Energi juga telah dibahas dalam forum G20 tahun 2022 dengan mengenalkan *Just Energy Transition Partnership*.

Sementara itu, untuk pengembangan EBT di dalam negeri telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Peraturan Pemerintah (PP) tersebut menyebutkan bahwa Sumber Energi Terbarukan adalah Sumber

Energi yang dihasilkan dari Sumber Daya Energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Presiden Jokowi pada KTT AZEC menyebutkan salah satu contoh pengembangan EBT yang saat ini dilakukan di Indonesia adalah pembangkit listrik geothermal di Muara Laboh, *waste to energy* di Legok Nangka, dan pengelolaan lahan gambut di Kalimantan Tengah.

Jokowi menekankan beberapa hal yang dapat dilakukan terkait Transisi Energi diantaranya

pentingnya kerjasama dekarbonisasi pendanaan yang inklusif untuk mengembangkan proyek-proyek *Carbon Capture Storage* (CCS) dan *Carbon Capture Utilization and Storage* (CCUS), dukungan pendanaan yang inovatif misalnya melalui *scaling up* pendanaan berkelanjutan dan pembiayaan inovatif seperti mekanisme transisi energi, sukuk dan obligasi hijau, serta bursa karbon. Selain itu, penting juga untuk melakukan sinergi pemerintah, swasta dan perbankan.

Terkait pelaksanaan Transisi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui siaran persnya pada bulan Februari 2023, menyampaikan informasi terbentuknya Sekretariat *Just Energy Transition Partnership* (JETP) atau Transisi Energi yang Adil. Fungsi Sekretariat JETP ini adalah melakukan koordinasi arahan dari tim gugus tugas dan teknis pelaksanaannya, termasuk proyek-proyek JETP dan pembiayaannya. Sementara itu tugasnya adalah mengatur kelompok kerja untuk percepatan program transisi energi JETP, yaitu sistem pembangkit, pembiayaan,

dekarbonisasi sektor pembangkit, rantai pasokan dan manufaktur, serta transisi energi sosial berkeadilan.

Sebagai tambahan informasi, di dalam KTT ASEAN di Jakarta pada tahun ini, telah disepakati pernyataan ASEAN *Plus Three Leaders* (China, Jepang dan Korea) terkait dengan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik. Kesepakatan ini didasarkan atas pentingnya mewujudkan upaya kolektif untuk integrasi regional dan kerjasama serta promosi pembangunan berkelanjutan sebagai respons terhadap tantangan dan peluang yang ada. Salah satu poin yang dideklarasikan adalah mendorong pengembangan kendaraan listrik, yang merupakan salah satu *pathways* yang penting di dalam ASEAN *Plus Three Countries* dalam mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca, akselerasi Transisi Energi yang Berkeadilan, dan mencapai Emisi *Zero Net* atau netralitas karbon melalui berbagai *pathways* sekaligus meningkatkan keamanan energi masing-masing negara Anggota ASEAN *Plus Three*.▼

“
salah satu contoh pengembangan EBT
yang saat ini dilakukan di Indonesia
adalah pembangkit listrik *geothermal* di
Muara Laboh, *waste to energy* di Legok
Nangka, dan pengelolaan lahan gambut di
Kalimantan Tengah
”

- JOKO WIDODO -
Presiden Republik Indonesia

Rancangan Perubahan Peraturan Menteri PUPR Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur



Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PermenPUPR) No.2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, di Bali, Senin (09/10/2023).



Foto Oleh:
Dok. DJPI

Dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dirjen PI), Herry Trisaputra Zuna mengatakan untuk menciptakan ekosistem pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan dan menarik bagi investor, diperlukan terobosan dan langkah strategis yang perlu dituangkan dalam penyempurnaan Regulasi Rapermen KPBU.

“Yang pertama bagaimana prosesnya cepat, karena prosesnya butuh waktu. Kami memulai dengan angka 6 plus 3. Enam bulan penyiapan dan tiga bulan transaksi yang didukung dengan standarisasi dokumen pendukungnya,” ungkap Herry.

Lebih lanjut, Dirjen PI menjelaskan, “Kedua, meningkatkan kepastian investasi bagi investor. Bagaimana proyek infrastruktur bisa menarik swasta melalui perluasan penjaminan pemerintah serta inovasi dukungan pemerintah seperti *VGFinancing* dan *Hybrid annuity model*. Ketiga, Proyek KPBU harus terintegrasi dengan prinsip *Environmental, Social* dan *Governance* (ESG) untuk meningkatkan akses kepada pembiayaan yang berkelanjutan”, terang Dirjen PI.

Sementara itu, sasaran yang ingin diwujudkan dengan penyusunan KPBU PUPR ini adalah optimalisasi bisnis proses pelaksanaan KPBU di Kementerian PUPR, serta pembagian

“
**Proyek KPB
harus terintegrasi
dengan prinsip
Environmental, Social
dan Governance
(ESG) untuk
meningkatkan akses
kepada pembiayaan
yang berkelanjutan**
”

- HERRY TRISAPUTRA ZUNA -
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan

wewenang yang lebih jelas, efektif, dan efisien dalam rangka percepatan pelaksanaan KPB dan sebagai upaya pemenuhan *funding gap* penyediaan infrastruktur bidang PUPR melalui sumber pendanaan Non-APBN.

Adapun tujuan pelaksanaan Konsultasi Publik adalah untuk menyerap aspirasi serta menjaring masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan peraturan KPB dalam penyediaan infrastruktur di Kementerian PUPR. ▼





Foto:
Dok. DJPI

Dashboard Profil Investasi PDAM: Navigasi Investasi Cerdas untuk Air Minum Aman dan Berkelanjutan

Ditulis oleh: **Rizki Akbar Maulana dan E. Hardiansyah P. Putra**
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Air bersih dan pelayanan PDAM yang andal adalah fondasi utama untuk kehidupan yang sehat dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Dashboard Profil Investasi PDAM dapat menjadi instrumen kunci bagi para investor yang ingin berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan air minum nasional. Melalui navigasi cerdas ini, para calon investor dapat memperoleh wawasan mengenai peluang investasi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.



Foto:
Dok. DJPI

DASHBOARD PROFIL INVESTASI PDAM

Dashboard Profil Investasi PDAM membuka pintu menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang kinerja dan potensi investasi PDAM di seluruh Indonesia. Sistem ini, yang dikembangkan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (Dit. PPIP), menjadi jembatan antara investor dengan PDAM, menyajikan data kondisi 396 perusahaan PDAM di seluruh Indonesia.

Dua peluang investasi utama yang terpapar dalam *dashboard* ini adalah peningkatan cakupan layanan dan penurunan *Non-Revenue Water* (NRW). Dengan terintegrasi dan terukurnya data, investor dapat melihat potensi dan tantangan di berbagai wilayah, membantu mereka membuat keputusan investasi yang lebih tepat.

Dashboard ini memuat 20 indikator kinerja yang menjadi dasar penilaian kinerja PDAM. Data-data ini memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi operasional PDAM, mulai dari aspek teknis hingga pelayanan pelanggan.

Visualisasi data kinerja nasional menjadi salah satu komponen kunci *dashboard* ini. Dibangun dengan informatif, lengkap, dan menarik, visualisasi ini memungkinkan investor untuk dengan mudah memahami dinamika pasar air minum di seluruh negeri. Peta interaktif menyoroti lokasi-lokasi strategis dengan potensi investasi tinggi, memberikan pandangan geografis yang sangat berharga.

Selain itu, *dashboard* ini memberikan keleluasaan kepada investor dengan adanya filter awal berdasarkan enam kategori kriteria potensi investasi. Mulai dari persentase tarif (FCR) >100%, NRW >33%, cakupan layanan <70%, rata-rata pemakaian air >16m³/bulan, *idle capacity* >10%, *existing capacity* >500 lpd hingga kapasitas kredit. Filter ini bukan hanya memberikan analisis awal yang signifikan, tetapi juga membantu para pengguna untuk memfokuskan perhatian pada PDAM yang memiliki potensi tinggi dan membutuhkan perhatian khusus. Dengan demikian, *Dashboard* Profil Investasi PDAM bukan sekadar alat, melainkan solusi cerdas bagi para investor yang

berkeinginan untuk berinvestasi dalam rangka penambahan cakupan layanan dan penurunan NRW yang pada ujungnya membawa perubahan positif dan berkelanjutan di sektor air minum nasional.

DATA MENJADI DASAR KEPUTUSAN INVESTASI

Dalam era yang semakin terdigitalisasi, data bukan sekadar sekumpulan angka dan fakta, melainkan instrumen strategis yang menentukan arah keputusan investasi. Keberhasilan atau kegagalan suatu investasi tidak hanya bergantung pada intuisi atau keberuntungan semata, melainkan pada kemampuan untuk menggali wawasan mendalam dari data yang tersedia. Dalam konteks ini, data bukan hanya menjadi panduan, tetapi juga pilar yang membangun kepercayaan dan keyakinan dalam mengambil langkah-langkah investasi yang terencana.



- E. HARDIANSYAH P. PUTRA -
Pranata Komputer Ahli Muda - Dit. PPIP

Namun, penting untuk diingat bahwa memahami data bukanlah sekadar soal kuantitas. Kualitas data juga memainkan peran sentral dalam menghasilkan informasi yang berarti. Dalam konteks investasi, data berkualitas tinggi memberikan dasar yang solid untuk pengambilan keputusan yang akurat. Oleh karena itu, pengelolaan data dengan baik, termasuk validasi, kebersihan, dan interpretasi yang cermat, menjadi aspek penting yang mendukung keberhasilan suatu investasi.

Investasi PT Adaro Tirta Mandiri (ATM) di Paris Van Java, Kota Bandung, dapat dijadikan salah satu rujukan. PDAM Kota Bandung dan PT ATM menjalankan kemitraan strategis dalam mengatasi tantangan *Non-*

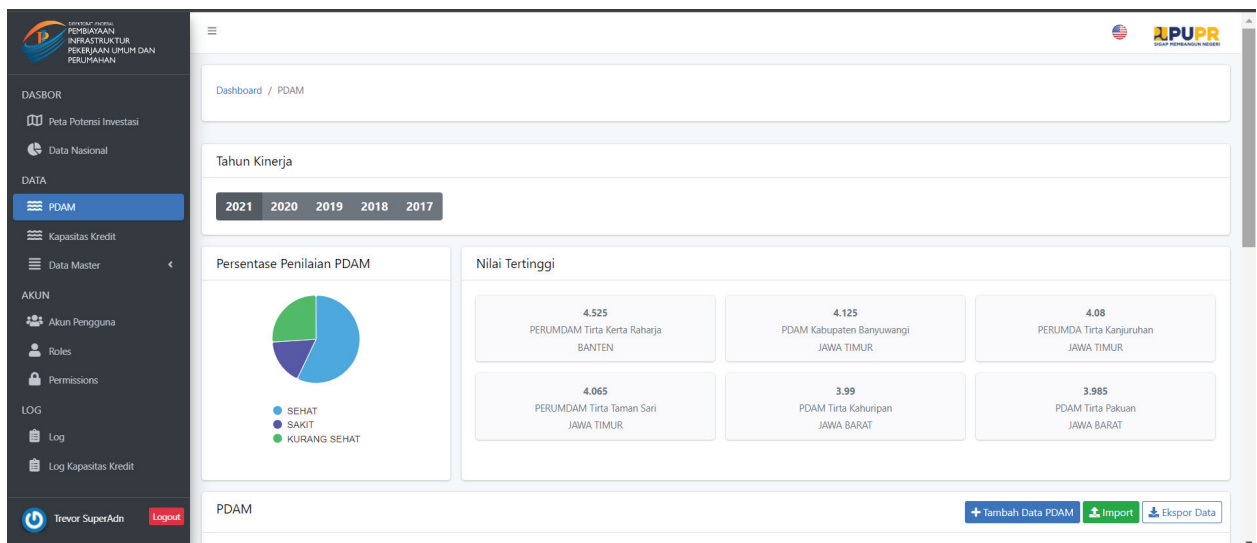
Revenue Water (NRW) di wilayah utara Kota Bandung, yang sebelumnya mencapai tingkat NRW 43%. Dengan total nilai investasi mencapai Rp148 juta, kemitraan ini mencerminkan komitmen serius mereka untuk mengatasi permasalahan ini. Proyek ambisius ini bertujuan menurunkan NRW menjadi 17% dalam 11 tahun, menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Berbeda dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), proyek yang diinisiasi sejak tahun 2018 ini menggunakan skema *Business to Business* (B2B). Skema B2B memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan KPBU, sehingga investor harus benar-benar

memperhitungkan segala resiko dalam berinvestasi, sehingga analisis investasi yang mendalam diperlukan, dan hal ini tidak terlepas dari data-data yang jumlahnya tidak sedikit dan berkualitas tinggi. PT Adaro Tirta Mandiri dan PDAM Kota Bandung bersatu untuk mengubah tantangan menjadi peluang, menyediakan air minum yang aman dan berkelanjutan kepada masyarakat, sambil menciptakan nilai investasi yang berkesinambungan.

KOLABORASI MENGEMBANGKAN KETERBUKAAN DATA

Dalam perjalanan menggali potensi dan menghadapi tantangan di sektor air minum nasional, peran kolaborasi dan keterbukaan data tidak



dapat diabaikan. *Dashboard* Profil Investasi PDAM yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi manifestasi nyata dari upaya bersama berbagai pihak, termasuk para *stakeholder* utama, seperti investor. Dalam mengakhiri pembahasan ini, penting untuk menggarisbawahi bahwa kolaborasi menjadi kunci dalam mengembangkan keterbukaan data, memastikan bahwa setiap keputusan investasi didukung oleh informasi yang akurat dan transparan.

Dashboard ini tidak hanya merupakan hasil karya teknis dari Dit. PPIP, tetapi juga mewakili partisipasi aktif dari para investor, PDAM dan pihak-pihak terkait lainnya. Masukan-masukan berharga dari para pemangku

kepentingan, khususnya para investor yang mencari peluang investasi yang cerdas, serta PDAM yang memberikan data yang aktual dan akurat menjadi dasar pengembangan fitur-fitur *dashboard* yang relevan. Dengan demikian, kolaborasi menjadi fondasi yang kuat untuk membangun alat yang mampu merespons kebutuhan dan tuntutan pasar dengan lebih presisi.

Seiring berjalannya waktu, komitmen untuk mengembangkan keterbukaan data tidak akan surut. *Dashboard* ini akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan peluang di sektor air minum. Peran para investor sebagai pihak yang memberikan pandangan strategis akan

terus diakui dan dihargai. Peluang-peluang baru yang muncul akan terus diakomodir, memastikan bahwa *dashboard* tetap menjadi sumber informasi terkini dan relevan.

Dengan demikian, kolaborasi yang terjalin erat antara pemangku kepentingan, khususnya para investor, PDAM dan pengembang *dashboard* menciptakan landasan yang kokoh untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan efektif dalam menjawab kebutuhan air minum nasional. Keterbukaan data bukan hanya menjadi komitmen, tetapi juga jalan yang membawa kita menuju sistem air minum yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan pasar. ▼

Penilaian Tingkat Kinerja PDAM

Hasil Kinerja
[KURANG SEHAT]

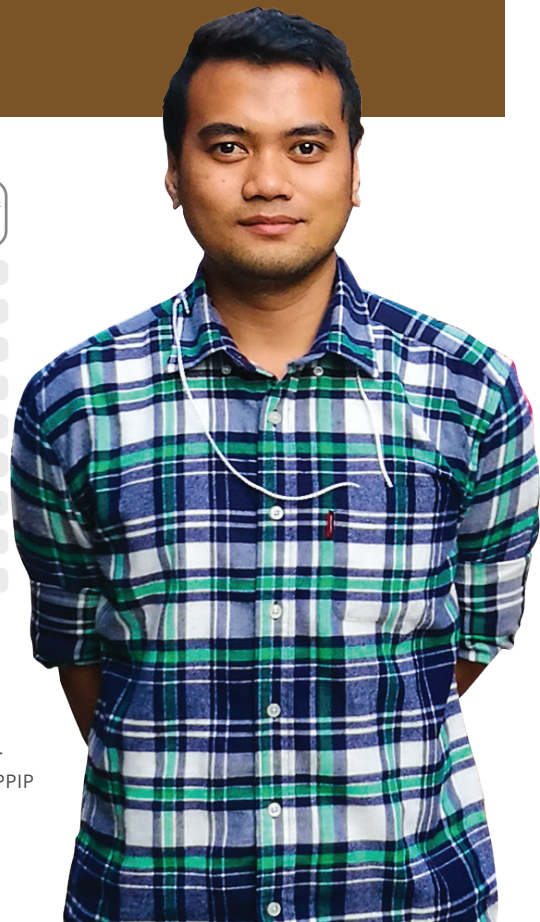
Penilaian Kinerja PDAM Tirta Singkil dengan No Registrasi A 1102-01, Berdasarkan Komponen Perhitungan, Untuk tahun 2021 mendapatkan penilaian 2,235

A Return Of Equity (ROE)	-4.31 % [1]	J Konsumsi Air Domestik	25.47 [1]
B Rasio Operasi	1.13 [1]	K Efisiensi Produksi	47.43 % [1]
C Rasio Kas	188.99 % [5]	L Tingkat Kehilangan Air	33.6 % [1]
D Efektivitas Penagihan	74.53 % [1]	M Jam Operasi Layanan	14.25 [1]
E Solvabilitas	918.03 % [5]	N Tekanan Air Pelanggan	0 % [1]
F Cakupan Pelayanan Teknis	26.76 % [2]	O Penggantian Meter Air	9.26 % [2]
G Pertumbuhan Pelanggan	-1.89 % [1]	P Rasio Pegawai	8.23 % [4]
H Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100 % [5]	Q Rasio Diklat Pegawai	0 % [1]
I Kualitas Air Pelanggan	0 % [1]	R Rasio Beban Diklat Pegawai	0 % [1]

Keterangan :

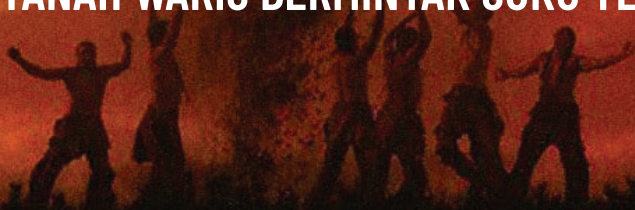
- : Nilai Bobot Kinerja = 1
- : Nilai Bobot Kinerja = 2-3
- : Nilai Bobot Kinerja = 4-5

- RIZKI AKBAR MAULANA -
Pranata Komputer Ahli Muda – Dit. PPIP



KILLERS OF THE FLOWER MOON

PEREBUTAN TANAH WARIS BERMINYAK SUKU TERKAYA OSAGE





*Penantian penggemar film atas karya terbaru sutradara kondang Martin Scorsese, **Killers of the Flower Moon**, akhirnya usai sudah. Film yang dibintangi Leonardo DiCaprio ini tayang di bioskop Tanah Air pada 18 Oktober 2023 lalu.*

*Kisah dalam **Killers of the Flower Moon** diangkat dari buku kaya jurnalis David Grann, bertajuk **Killers** yang diterbitkan pada 2017.*

*Dilansir dari **USA Today**, Minggu (22/10/2023) cerita dalam buku ini, adalah kisah nyata yang merupakan hasil riset dan interview bertahun-tahun David Grann dengan para tetua Osage.*

Tanah Waris Berminyak

Dalam film ini, Scorsese menggandeng penulis skenario Eric Roth (*Forrest Gump*, *The Curious Case of Benjamin Button*) untuk mengerjakan naskah. Cerita film berpusat pada kehidupan suku Osage, suku asli Amerika yang tinggal di daerah tandus Oklahoma.

Pada 1920-an, Osage dianggap sebagai salah satu suku terkaya di dunia. Sebutan terkaya itu disematkan karena suku ini berhasil menemukan minyak di bawah tanah tempat mereka bermukim. Mereka lantas mengelola ekspor minyak itu, sehingga memperkaya setiap penduduk lokal suku Osage. Ada sekitar 2 ribu orang yang terdaftar dalam suku Osage, dan

secara kolektif memiliki kekayaan lebih dari US\$30 juta, atau senilai US\$500 juta saat ini.

Saat itu sangat sedikit orang Amerika yang memiliki mobil, tapi warga Osage banyak yang memiliki mobil sekaligus punya pelayan yang kebanyakan berkulit putih.

Hasil dari sumber daya yang melimpah itu tetap dapat dinikmati turun temurun. Anggota Osage dan ahli waris mereka, baik keturunan asli atau bukan, berhak atas royalti produksi minyak. Mereka memiliki hak itu berdasarkan kepemilikan tanah masing-masing. Hak tersebut juga dapat diwariskan kepada ahli waris yang sah, termasuk non-Osage.

Beberapa orang kulit putih yang oportunis ingin mencari untung, salah satunya William King Hale (Robert De Niro). Ia menghabiskan waktu lama untuk membangun relasi dengan bangsa Osage. Kedekatan itu dijalin demi rencana besar, yakni menguasai tanah dan hak atas royalti minyak dari bangsa Osage. Rencana tersebut dijalankan dengan mengajak keponakannya yang menganggur, Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio).

Ernest diajak ikut tinggal di tengah penduduk Osage dengan tujuan menikahi salah satu wanita asli suku itu. Ernest pun jatuh hati dengan Mollie Kyle (Lily Gladstone) dan akhirnya menikah. Pernikahan yang menyimpan motif kejam itu, membuat Ernest - atas perintah King Hale - melakukan serangkaian tindakan demi mengamankan hak tanah keluarga Mollie. Termasuk munculnya kasus pembunuhan berantai yang meneror keturunan asli suku Osage.



“

History is a merciless judge. It lays bare our tragic blunders and foolish missteps and exposes our most intimate secrets, wielding the power of hindsight like an arrogant detective who seems to know the end of the mystery from the outset.

”

DAVID GRANN

Penulis buku Killers of the Flower Moon



Foto:
www.apple.com



Ditangkap dan Dipenjara

Killers of the Flower Moon menjadi karya terbaru Martin Scorsese setelah merilis *The Irishman* (2019) empat tahun lalu. Film ini tayang perdana secara global lewat *Cannes Film Festival 2023* dan mendapatkan *standing ovation* hingga sembilan menit, setelah film diputar.

Di kehidupan nyata, menurut sang penulis David Grann, Ernest dan William ditangkap pada tahun 1926 atas pembunuhan saudara

perempuan Mollie yaitu Reta, dan suaminya, Bill Smith. Ernest mengakui perannya dalam rencana pembunuhan dan bersaksi melawan sang paman.

William Hale dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tapi bisa keluar karena mendapat pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman 18 tahun. Ia meninggal pada usia 87 tahun, pada tahun 1962. ▼



BENDUNGAN TIGA DIHAJI

Kab. Oku Selatan, Sumatera Selatan

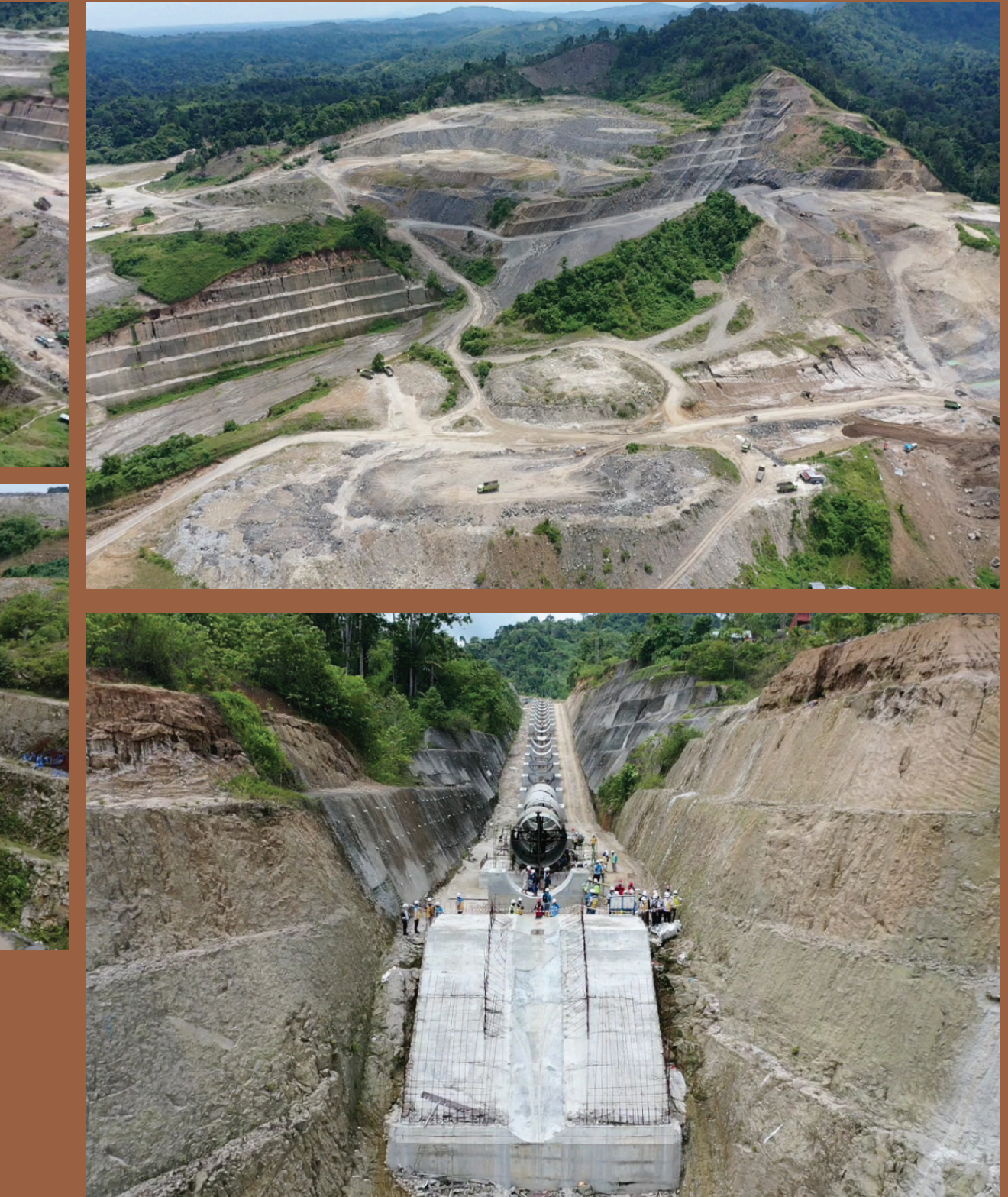
Tujuan utama pembangunan bendungan
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) ini untuk

menjaga kestabilan suplai air Daerah Irigasi
Komerling, terutama di saat musim kemarau.
Dengan begitu, hasil pertanian dari Provinsi
Sumsel akan terus terjaga sepanjang tahun.

Luas Genangan: 468.00 Ha

PLTA: 40.00 MW

PLTS : 93.60 MWp





KARALLOE

Kab. Gowa, Sulawesi Selatan

Bendungan ini dirancang dapat menjaga kontinuitas ketersediaan air untuk pertanian di Kabupaten Jeneponto sehingga petani dapat

meningkatkan produksinya. Selain berfungsi untuk irigasi dan pengendali banjir, Bendungan Karalloe berpotensi memberikan suplai air baku sebanyak 440 liter/detik.

Luas genangan: 248,50 Ha

PLTA : 4,32 MW

PLTS: 49.70 MWp



**TEMEF**

Kab. Timor Tengah Selatan, NTT

Bendungan PLTM dengan kapasitas tampung sebesar 45,78 juta m³ akan mengairi irigasi seluas 4.500 ha, mereduksi banjir 230 m³/dt dan menyediakan air baku dengan debit 0,13 m³/dt

serta menjadi potensi listrik mencapai 1 MW. Bendungan yang menjadi percontohan, karena bisa membuat penghijauan di lereng bendungan dengan menggunakan *sprinkler* (sistem otomatis penyiraman air melalui kepala yang melekat pada pipa).

Luas genangan: 297.78

PLTA: 1.68 MW

PLTS: 59.56 MWp





10 OKTOBER 2023

Dalam rangka meningkatkan kesadaran risiko bagi pejabat dan pegawai, DJPI mengadakan Bincang Risiko (BISIK) dengan tema *Risiko Kita, Kita Kelola!* pada Selasa, 10 Oktober 2023 pukul 08.00-selesai. Acara khusus untuk internal, yang ditayangkan pula lewat Youtube PUPR ini bertujuan menumbuhkan budaya sadar risiko di internal DJPI, demi membangun kerja sama dalam pengelolaan risiko.



Hadir empat pembicara yakni Herry Trisaputra Zuna (Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan), Binsar H Simanjuntak (Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Auditing & Pembangunan), Agus Sulaeman (Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan), Ratih Kusumartiwi (Praktisi Manajemen).

20 OKTOBER 2023

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan saat ini sedang melaksanakan proses untuk sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Manfaat Penerapan dari SMAP antara lain; Dapat membantu institusi dalam mencegah, mendeteksi dan menangani potensi penyuapan; Mensejajarkan diri dengan *values* yang dimiliki organisasi dan institusi mancanegara.

Termasuk juga manfaat lainnya yakni, Terhindar dari kasus korupsi dan kerugian yang dapat menurunkan reputasi institusi atau organisasi; Institusi dan Organisasi akan semakin mengikat kredibilitasnya baik di mata publik, pelanggan, investor dalam negeri maupun maupun luar negeri. Meminimalkan *financial losses* dan meningkatkan *financial gains* melalui berbagai upaya efisiensi; Menghindarkan institusi dari pemicanaan korupsi.





8 NOVEMBER 2023

Dalam rangka Hari Bakti PUPR RI ke-78 Tahun 2023, di Jakarta digelar, beragam acara di lingkungan Kementerian PUPR, baik kegiatan sosial, pertandingan olahraga maupun perlombaan seni budaya. Sesditjen DJPI Sudiro Roi Santoso hadir dalam acara pembukaan Pertandingan Olah Raga Tenis meja, Rabu (08/11/23).

Sesditjen DJPI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pegawai, Dharma wanita/Paguyuban, IPPU dan Mitra Kerja Kementerian PUPR dan mengajak semua pihak menjadikan *event* ini sebagai ajang silaturahmi, mempererat keakraban dan kebersamaan keluarga besar Kementerian PUPR, sekaligus menjadi sarana mencari bibit atlet-atlet berbakat untuk bisa mewakili Kementerian PUPR dalam pertandingan olah raga di tingkat lebih tinggi di luar lingkup Kementerian PUPR.



17 NOVEMBER 2023

Dalam acara *Treasury Talks 2023: Strategi Instrumen Pendanaan untuk Mendukung Pembiayaan Perumahan di Indonesia* pada 17 November 2023, di Jakarta, Dirjen PI Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menyampaikan, berdasarkan data Susenas Tahun 2021, penyediaan perumahan dihadapkan pada tantangan besar untuk menyelesaikan 12,71 juta *backlog* rumah tangga yang terus bertambah setiap tahunnya, juga tantangan 23,7 juta rumah tidak layak huni.

Herry menyampaikan bahwa Kementerian PUPR mengapresiasi upaya PT SMF dalam memberikan informasi dan wawasan kepada pelaku industri pembiayaan perumahan. “Ke depan, sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV), PT SMF diharapkan dapat memperluas layanan dengan menyediakan opsi instrumen pendanaan jangka panjang untuk mendukung pembiayaan perumahan di Indonesia, melalui penerbitan *social bond* dan *sustainability bond* sebagai upaya meningkatkan investor untuk berpartisipasi dalam pembiayaan perumahan,” kata Herry.





Apa Itu BBA (Bantuan Biaya Administrasi) Pada KPR Bersubsidi?

PERTANYAAN

Sdr. Rakhmat, Bengkulu:

Kepada PPID Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Perkenalkan nama saya Rakhmat Agustian, saat ini saya berstatus PNS pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah. saya telah melaksanakan akad kredit rumah KPR Subsidi di Bank BTN Bengkulu dengan Pengembang atas nama PT Prima Artha Estetika. Kemudian saya dan nasabah lainnya juga telah menandatangani surat pengakuan kekurangan bayar biaya administrasi (BBA) untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar 4 juta Rupiah. Yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan BBA? Terima kasih

JAWABAN

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Sebagai informasi berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2023 tentang Bantuan Biaya Administrasi Pembiayaan Pemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Pemerintah memberikan BBA (Bantuan Biaya Administrasi) yang diperuntukan kepada Debitur/Nasabah KPR Sejahtera atau KPR Tapera sebagai pemenuhan sebagian atau seluruh biaya administrasi KPR Sejahtera atau KPR Tapera. BBA akan diberikan Setelah Debitur/Nasabah mendapatkan nomor lolos pengujian tagihan KPR Sejahtera/nomor lolos uji akad KPR Tapera, dan BBA diberikan sesuai Surat Pengakuan Kurang Bayar Biaya Administrasi maksimal Rp4 juta. Demikian informasi yang disampaikan, terima kasih

LEBIH DEKAT DENGAN KAMI



Manfaatkan layanan daring
untuk menanyakan atau berkonsultasi
seputar pelayanan publik
di kementerian PUPR

Melalui email, telepon dan website:



informasi@pu.go.id



Call Center 158

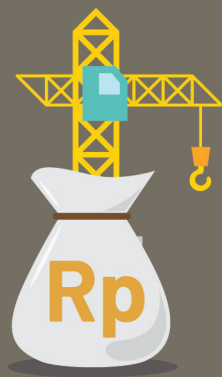


sahabat.pu.go.id

Melalui sosial media:

@pupr_pembiayaan





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Website
pembiayaan.pu.go.id

Twitter
[@pupr_Pembiayaan](https://twitter.com/pupr_Pembiayaan)

Instagram
[@pupr_Pembiayaan](https://www.instagram.com/pupr_Pembiayaan)

YouTube
[pupr_pembiayaan](https://www.youtube.com/pupr_pembiayaan)